

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2013). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh Akuntan Publik (Edisi ke-4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustina, S. (2024). *Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan Desa Malalin Kabupaten Enrekang*. Skripsi.
- Aulia Pulung, S. J. (2022). *Implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa (studi kasus pada Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*. Skripsi.
- Ayu, et al. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa dalam implementasi Siskeudes. *Jurnal*.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi 3)*. Jakarta: Erlangga.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. California: SAGE Publications.
- Diasmountaina, I. (2023). *Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan pelaporan keuangan desa di Kabupaten Jembrana*. Skripsi.
- Dinda, & Fajar. (2022). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal*. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Erfin. (2019). Good governance dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45–56.
- Gayatri, G., dkk. (2017). Transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07>
- Halim, A. (2017). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hastutiningtyas, K. N. (2021). Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Desa Gunungsari. *Jurnal*.
- Kompas.com. (2025, 30 April). Dugaan penyelewengan anggaran desa di Plampangrejo. Kompas.com.
- Lembaga Administrasi Negara. (2000). *Akuntabilitas dan good governance*. Jakarta: LAN.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. California: SAGE Publications.
- Lubis, H. Z. (2025). *Siskeudes: Inovasi digital dalam pengelolaan dana desa*. Medan: UMSU Press. ISBN 978-623-408-891-5.
- Mahin, M. (2024). Penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. *Skripsi*.
- Mardaw, M. (2022). Efektivitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. *Skripsi*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). California: SAGE Publications.
- Nur'aini, D. (2020). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sosial*, 4(1), 15–23.
- Sanusi, A. (2013). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, E. (2020). Implementasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa. *Jurnal*.

- Sulistiyowati, E., et al. (2019). Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes): Studi kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *Jurnal*.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.
- Watulingas, J., Kalangi, L., & Suwetja, I. (2019). Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 10(2), 45–56.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.